



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
2017

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Setditjen PAUD dan Dikmas) dapat terlaksana dengan baik. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada instansi pemerintah untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Setditjen PAUD dan Dikmas menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban Setditjen PAUD dan Dikmas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan dukungan teknis manajemen di bidang PAUD dan Dikmas secara transparan dan akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban yang berisi informasi atas capaian sasaran strategis dalam lingkup Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas selama satu tahun anggaran. LAKIP ini mendeskripsikan pelaksanaan program di tahun ketiga perealisasi target Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2015-2019. LAKIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan koreksi untuk mengetahui prestasi yang diraih dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program PAUD dan Dikmas sehingga dapat mencari solusi untuk mengatasi kendala/permasalahan yang ada.

Data dan informasi yang tertuang di LAKIP Setditjen PAUD dan Dikmas diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perhatian seluruh pimpinan dan juga para pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas. Hal ini ditujukan untuk melanjutkan, merealisasikan tujuan, dan memperbaiki kinerja dalam perealisasi target Rencana Strategis pada tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2018

Sekretaris,



**Dr. Wartanto, MM**

NIP. 196310091989031001



## DAFTAR ISI

### halaman

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi

## **BAB I PENDAHULUAN** **1**

A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
D. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	5

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA** **7**

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** **25**

A. Capaian Kinerja	25
B. Realisasi Anggaran	41

## **BAB IV PENUTUP** **46**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kegiatan dan Anggaran Pengendalian Data dan Informasi PAUD dan Dikmas	8
Tabel 2.2	Kegiatan dan Anggaran Kabupaten/Kota Melaksanakan Pengaustamaan Gender Bidang Pendidikan	10
Tabel 2.3	Kegiatan dan Anggaran Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas	11
Tabel 2.4	Kegiatan dan Anggaran Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas	13
Tabel 2.5	Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan dan Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	14
Tabel 2.6	Kegiatan dan Anggaran Hukum dan Tatalaksana Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (SPM-NSPK)	16
Tabel 2.7	Kegiatan dan Anggaran Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	19
Tabel 2.8	Kegiatan dan Anggaran Pelaksanaan Kerjasama, Kehumasan, dan Publikasi	20
Tabel 2.9	Kegiatan dan Anggaran SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan kompetensi dan/atau Kualifikasinya	22
Tabel 2.10	Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan BMN Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	23
Tabel 3.1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi PAUD dan Dikmas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPT	27
Tabel 3.2	Kabupaten/Kota Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	28
Tabel 3.3	Jumlah Dokumen Program Dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas	29
Tabel 3.4	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas	31
Tabel 3.5	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	32
Tabel 3.6	Jumlah Dokumen Hukum dan Tatalaksana Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (SPM-NSPK)	35
Tabel 3.7	Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	36
Tabel 3.8	Jumlah Dokumen Kerjasama, Kehumasan, dan Publikasi	37
Tabel 3.9	Jumlah SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan Kompetensi dan/atau Kualifikasinya	38
Tabel 3.10	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	39
Tabel 3.11	Serapan Anggaran Per Jenis Belanja	43
Tabel 3.12	Serapan Anggaran Per Kegiatan	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Setditjen PAUD dan Dikmas	5
Gambar 3.1 Chart Hasil Penilaian 10 IKK	25
Gambar 3.2 Dirjen PAUD dan Dikmas Pada Saat Memberikan Arahan dan Membuka Kegiatan Seminar Internasional SEAMEO CECCEP	27
Gambar 3.3 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017 Tahap I di Padang	30
Gambar 3.4 Kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Keuangan yang di gelar di Hotel Horison Bekasi	33
Gambar 3.5 Upacara pembukaan Raimuna Nasional (Rainas) Tahun 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur	37
Gambar 3.6. Pagu dan Serapan Anggaran Setditjen PAUD dan Dikmas	44
Gambar 3.7 Serapan Anggaran Setditjen PAUD dan Dikmas	44

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT 2017 yang merupakan Pelaksanaan dari Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Fungsi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PAUD dan Dikmas yang diemban oleh Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas adalah untuk memenuhi tujuan strategis ketersediaan sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan. Pengukuran pencapaian tujuan strategis tersebut ditetapkan di dalam sasaran strategis dan tertuang dalam sepuluh indikator kinerja.

Pada tahun 2017, dari sepuluh indikator kinerja, Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas telah memenuhi kinerja dengan realisasi yang 100%. Selain itu capaian pelaksanaan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 87,77% (berdasarkan hasil dari aplikasi Monitoring Laporan Keuangan/MoLK) sedangkan realisasi netto berdasarkan SAK adalah sebesar 83,7%.

Terdapat sepuluh indikator capaian yang menunjang sasaran strategis, diantaranya adalah (1) Dokumen data dan informasi PAUD - Dikmas nasional, provinsi, kabupaten, dan kota; (2) jumlah kab/kota melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan; (3) jumlah dokumen program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas; (4) dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas; (5) dokumen pengelolaan dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (6) dokumen hukum dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SPM-NSPK); (7) dokumen kepegawaian dan pembinaan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (8) dokumen pelaksanaan kerja sama, kehumasan, publikasi; (9) SDM Ditjen PAUD Dikmas meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya; (10) dokumen pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari 10 indikator kinerja, yang realisasinya mencapai target atau sebesar 100% sebanyak 9 indikator, dan 1 indikator realisasinya di atas target yakni sebesar 120% (jumlah kab/kota melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan). Walaupun capaian kinerja secara keseluruhan sudah mencapai target, namun masih ditemui beberapa kendala/hambatan sebagai berikut : (1) kuantitas SDM di 21 UPT baru, belum sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan; (2) kualitas SDM pada 21 UPT baru masih kurang dalam mendukung pelaksanaan program; (3) beberapa UPT masih belum memiliki gedung, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

Upaya antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut adalah (1) pengadaan CPNS sesuai dengan kebutuhan, dan merekrut tenaga kerja kontrak non PNS yang profesional (2) melakukan *assessment* pegawai dan meningkatkan kapasitas SDM melalui diklat; (3) koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan gedung perkantoran.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Pencapaian tujuan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah usaha untuk memenuhi ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program-program perencanaan kegiatan disusun sebagai aksi nyata yang direalisasikan oleh unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap unit utama menyusun perencanaan program dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit utama sebagai suatu integrasi yang tidak saling terpisahkan dalam payung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penguatan tata kelola yang baik dalam birokrasi pemerintahan (*good governance*) merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan. Lemahnya *good governance* menyebabkan layanan pendidikan belum dapat dilaksanakan secara merata, bermutu, berkeadilan, dan akuntabel. Fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, dan ketenagaan, serta dukungan infrastruktur secara umum turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebaliknya, kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Kelemahan dan tantangan ini terasa semakin berat apabila dikaitkan dengan pelaksanaan program-program di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang memiliki sasaran masyarakat marginal yang memiliki kelemahan dan kendala baik ekonomis, geografis, dan infrastruktur pendidikan, sehingga kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan. Apalagi jika dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian besar sasaran program Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tinggal di daerah pedesaan yang terpencil dan terisolir.

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas (Setditjen PAUD dan Dikmas) sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas (Ditjen PAUD dan Dikmas) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan manajerial dan administratif, pembinaan serta melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan unit organisasi di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Dalam konteks pelaksanaan program-program di bidang PAUD dan Dikmas, maka tugas Setditjen PAUD dan Dikmas dapat dikatakan sangat strategis karena keberhasilan pelaksanaan program itu sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi pelayanan teknis dan administrasi maupun pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan agar mampu mendorong peran serta seluruh pihak dan memperlancar pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja Setditjen PAUD dan Dikmas harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan objektif sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya lebih berhasil dan berdaya guna untuk mendukung tercapainya visi dan misi PAUD dan Dikmas.

Pemerintah telah berusaha untuk mendorong agar setiap instansi pemerintah dapat melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan *good governance*. Secara formal, upaya ini mulai dilaksanakan pada tahun 1999 seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipandang sebagai salah satu determinan yang menentukan keberhasilan mewujudkan *good governance*.

Setditjen PAUD dan Dikmas berusaha untuk melaksanakan penyusunan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 sebagai langkah preventif dalam melakukan pelaksanaan program tahun 2017. LAKIP disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2017 berdasar pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

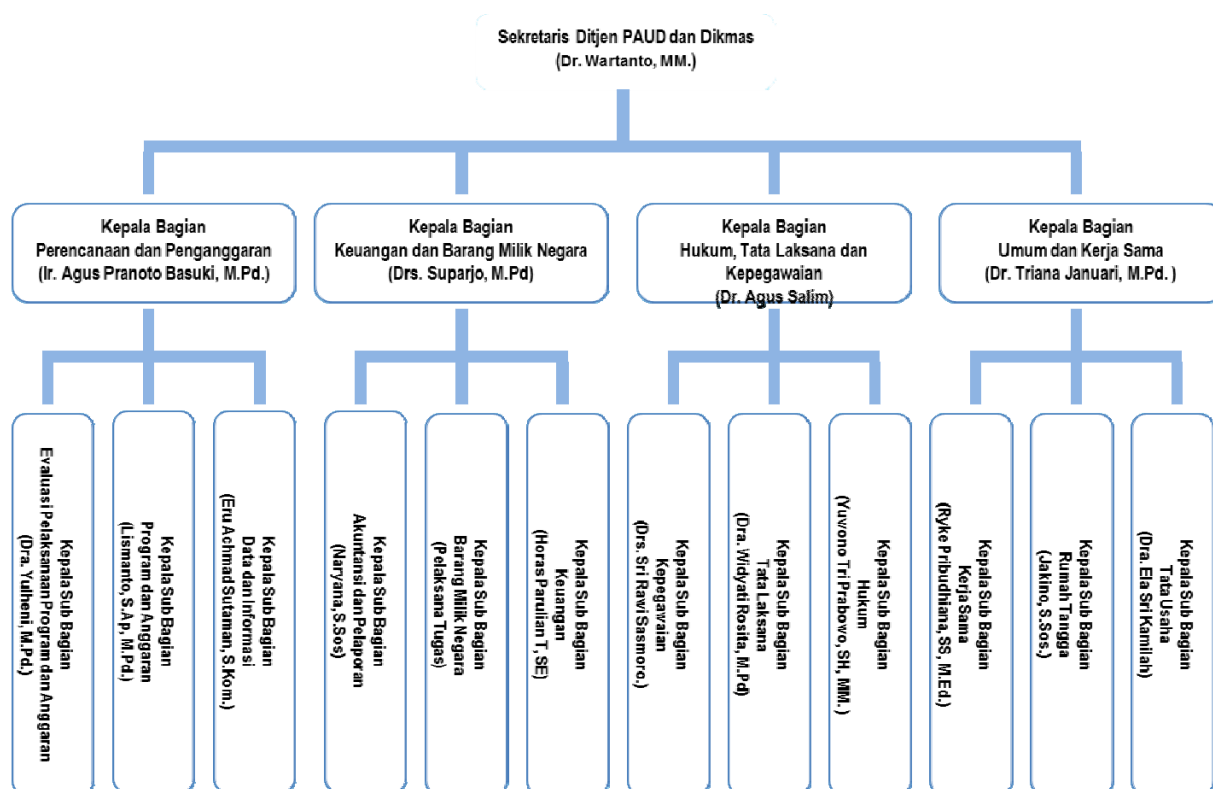
### C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta berkordinasi dengan satuan kerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. Koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas;
6. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
7. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas;
8. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas;
9. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
10. Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas; dan
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas.



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Setditjen PAUD dan Dikmas**

#### **D. Permasalahan Utama (Isu Strategis)**

Beberapa masalah yang sangat dirasakan oleh Setditjen PAUD dan Dikmas dalam melaksanakan kegiatan tahun 2017, diantaranya:

1. Bergabungnya 21 (dua puluh satu) UPT PAUD dan Dikmas (BP-PAUD dan Dikmas) pada Ditjen PAUD dan Dikmas yang tidak diimbangi dengan penambahan anggaran, sehingga menyebabkan terjadi pergeseran anggaran untuk memenuhi biaya operasional 21 UPT PAUD dan Dikmas tersebut. Hal tersebut berpengaruh terhadap target kerja satker yang lain.
2. Pemotongan anggaran pada akhir tahun sangat berpengaruh terhadap pencapaian kegiatan Setditjen PAUD dan Dikmas.
3. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan PAUD dan Dikmas menjadi urusan Kabupaten/kota sehingga pemerintah Provinsi tidak memiliki tugas bidang PAUD dan Dikmas.

Perubahan ini berpengaruh pada kelancaran kegiatan dan kerja sama di tingkat provinsi.

4. Keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dalam rangka mengawal berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan permasalahan di atas, Setditjen PAUD dan Dikmas pada tahun 2018 mendapatkan tambahan anggaran untuk menopang anggaran UPT PAUD dan Dikmas (PP dan BP-PAUD dan Dikmas) yang sangat diperlukan. Hal ini sangat penting karena dengan tidak adanya kewenangan Provinsi di bidang PAUD dan Dikmas maka peran UPT PAUD dan Dikmas (PP dan BP-PAUD dan Dikmas) menjadi sangat penting dalam melaksanakan dan mendukung program PAUD dan Dikmas di Provinsi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas yang menetapkan satu sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas dan 10 (sepuluh) indikator kinerja beserta target kinerja dan anggarannya.

Dari total Pagu DIPA awal sebesar Rp519.278.479.000,00 yang di perjanjikan kinerja sebesar Rp52.974.923.000,00, setelah di revisi total Pagu anggaran menjadi sebesar Rp235.787.141.000,00 dan peruntukan anggaran tersebut yang diperjanjikan kinerja dapat dirinci sebagai berikut:

#### **A. Dokumen Data dan Informasi PAUD dan Dikmas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan UPT**

Dalam perjanjian kinerja pada awal tahun 2017, dokumen data dan informasi PAUD dan Dikmas nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan UPT target kinerjanya sebesar 83 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.147.530.000,00. Setelah dilakukan revisi, target kinerja berubah menjadi 611 dokumen dengan alokasi anggaran Rp18.694.532.000,00. Terjadinya perubahan anggaran dan target kinerja dikarenakan bertambahnya indikator kinerja yaitu penyelenggaraan SEAMEO CECCEP. Selain itu, semua Kab/Kota telah mengikuti workshop Dapodik, dan semua satuan pendidikan yang berada di kab/kota telah mengisi dan memperbaiki Dapodik.

Dapat disampaikan dalam LAKIP ini, SEAMEO CECCEP (*Asian Ministers of Education Organization Centre for Early Childhood Care Education and Parenting*) merupakan lembaga pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga yang sangat diharapkan peran aktifnya dalam penuntasan pendidikan anak usia dini di Indonesia khususnya, umumnya di ASEAN. SEAMEO CECCEP dibentuk untuk merealisasikan program pertama dari 7 (tujuh) program prioritas SEAMEO, yaitu tercapainya pendidikan universal pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan



target anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang tinggal di pedesaan, etnis yang termarginalkan, serta anak-anak berkebutuhan khusus.

Perealisan indikator kinerja didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Kegiatan dan Anggaran Pengendalian Data dan Informasi  
PAUD dan Dikmas**

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subbag)
1	3.2019.1.1. Dokumen Data dan Informasi PAUD dan Dikmas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPT	Workshop Pemutakhiran DAPODIK PAUD - Dikmas	4.545.130.000	Subbagian Data dan Informasi
		Workshop Pemetaan Mutu	511.675.000	Subbagian Data dan Informasi
		Workshop Pengolahan Data	349.600.000	Subbagian Data dan Informasi
		Bimtek Pemutakhiran Data	1.029.530.000	Subbagian Data dan Informasi
		Analisis Pemanfaatan Data Hasil Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas	682.750.000	Subbagian Data dan Informasi
		Analisis SIM PAUD dan Dikmas	610.150.000	Subbagian Data dan Informasi
		Desain SIM PAUD dan Dikmas	110.250.000	Subbagian Data dan Informasi
		Ujicoba SIM PAUD dan Dikmas	290.632.000	Subbagian Data dan Informasi
		QC dan Penyempurnaan Aplikasi SIM PAUD dan Dikmas	200.150.000	Subbagian Data dan Informasi
		Penyusunan Pedoman dan Panduan Aplikasi SIM PAUD dan Dikmas	289.960.000	Subbagian Data dan Informasi
		Finalisasi Aplikasi dan Penyusunan Laporan Pengembangan Aplikasi SIM PAUD dan Dikmas	133.850.000	Subbagian Data dan Informasi

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subbag)
		Penyusunan Buku Data Pendidikan PAUD dan Dikmas	71.200.000	Subbagian Data dan Informasi
		Kajian Analisis data PAUD dan Dikmas	175.850.000	Subbagian Data dan Informasi
		Layanan Data dan Informasi	444.000.000	Subbagian Data dan Informasi
		Penyusunan Bahan Kebijakan dan NSPK	341.865.000	Subbagian Data dan Informasi
		SDGs 2017	957.438.000	Subbagian Data dan Informasi
		Persiapan Pendirian Seameo Ceccep	506.596.000	Subbagian Data dan Informasi
		Pelaksanaan Pendirian Seameo CECCEP	2.561.710.000	Subbagian Data dan Informasi
		Pengembangan Program Seameo Ceccep Melalui Kerjasama Internasional	1.153.635.000	Subbagian Data dan Informasi
		Penyusunan Program Seameo Ceccep	530.150.000	Subbagian Data dan Informasi
		Penyusunan Materi Sosialisasi	460.450.000	Subbagian Data dan Informasi
		Sosialisasi Seameo Ceccep	1.663.975.000	Subbagian Data dan Informasi
		Penyusunan Road Map SEAMEO CECCEP	365.100.000	Subbagian Data dan Informasi
		Penyusunan Buku Logo dan Kelengkapan SEAMEO CECCEP	195.823.000	Subbagian Data dan Informasi
		Persiapan Seminar Internasional SEAMEO CECCEP	136.400.000	Subbagian Data dan Informasi
		Workshop Penyusunan	228.900.000	Subbagian Data dan Informasi

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subbag)
		Kerangka Studi Program Pendidikan Keluarga		
		Workshop Peningkatan Kompetensi Pengelola SEAMEO CECCEP	147.763.000	Subbagian Data dan Informasi

#### B. Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

Jumlah kabupaten/kota melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan pada awal tahun ditargetkan 3 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.456.240.000,00. Setelah revisi, target indikator kinerja tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar 50 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp1.570.415.000,00. Perealisasi indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Kegiatan dan Anggaran Kabupaten/Kota Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan**

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subag)
2	3.2019.1.2. Kabupaten/Kota melaksanakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	Temu Koordinasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	1.015.280.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
		Penyusunan Buku PUG	167.450.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
		Uji Petik Pelaksanaan PUG	387.685.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

### C. Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas

Dalam perjanjian kinerja pada awal tahun 2017, jumlah dokumen program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas ditargetkan sebesar 12 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.029.758.000,00. Setelah dilakukan revisi, target kinerja menjadi 581 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.069.121.000,00. Target dokumen dan anggaran mengalami penambahan dikarenakan bergabungnya 21 UPT (BP-PAUD dan Dikmas) baru, dan kab/kota yang memperoleh DAK fisik maupun non fisik.

Target 581 dokumen merupakan rincian dari kegiatan pendukung yang ditargetkan dengan perhitungan 514 kab/kota, 34 provinsi, 29 UPT (PP dan BP-PAUD dan Dikmas) dan Satker di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Perealisasi indikator kinerja didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Kegiatan dan Anggaran Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas**

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subag)
3	3.2019.1.3. Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Ditjen PAUD dan Dikmas	5.761.200.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Penyusunan Program Kerja Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2017	218.950.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Penyiapan Bahan Renja Ditjen PAUD dan Dikmas	7.397.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Penyiapan RKAKL dan Penyiapan Rencana Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018	1.526.115.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Asistensi Perencanaan Pusat	269.404.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Asistensi Penelitian Dan Penelaahan RKAKL	123.100.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Revisi RKAKL dan DIPA	345.000.000	Subbagian Program dan Anggaran

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subag)
		Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran	312.450.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Peningkatan Kapasitas Petugas Perencanaan UPT	402.900.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Penyusunan Buku Perencanaan	258.600.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Reviu Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas	307.575.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Penyusunan Krisna dan Reviu Output RKAKL	319.400.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Koordinasi dan Pengendalian Rapim B	374.430.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Penyusunan Naskah Kebijakan dan Bahan Paparan	330.200.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Penyusunan RKP 2018	86.680.000	Subbagian Program dan Anggaran
		Asistensi Percepatan Pelaksanaan Program dan Kendali Revisi di UPT	425.720.000	Subbagian Program dan Anggaran

#### **D. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas**

Target indikator kinerja dokumen evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas dalam perjanjian kinerja awal tahun 2017 sebesar 14 dokumen dengan alokasi anggaran Rp8.594.925.000,00. Setelah dilakukan revisi, target indikator kinerja dan alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi 577 dokumen dengan alokasi anggaran Rp6.899.982.000,00. Penambahan target dokumen dikarenakan bergabungnya 21 UPT (BP-PAUD dan Dikmas) yang baru. Target 577 dokumen merupakan rincian dari kegiatan



pendukung yang ditargetkan dengan perhitungan 514 kab/kota, 34 provinsi, dan 29 UPT (PP dan BP-PAUD dan Dikmas). Perealisasian indikator kinerja didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Kegiatan dan Anggaran Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas**

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subag)
4	3.2019.1.4. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas	Asistensi Penyusunan Laporan Perkembangan	221.385.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran PAUD dan Dikmas	1.362.004.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
		Penyusunan Instrumen Monev	249.355.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
		Rakor Evaluasi Pelaksanaan Program Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017	2.968.716.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
		Penyusunan LAKIP Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016	242.123.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
		Penyusunan LAKIP Tengah Tahunan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017	303.288.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
		Asistensi Penilaian dan Evaluasi Sakip Ditjen PAUD dan Dikmas	417.925.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subag)
		Penyusunan dan Finalisasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program	26.460.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
		Peningkatan Kapasitas Penyusun Laporan Kinerja	392.909.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas	353.432.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
		Finalisasi Instrumen Monev	110.480.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
		FGD Pengolahan dan Analisis Data Monev	251.905.000	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

#### E. Dokumen Pengelolaan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam perjanjian kinerja pada awal tahun 2017, dokumen pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku target kinerjanya sebesar 13 dokumen dengan alokasi anggaran Rp9.041.317.000,00. Setelah revisi, target kinerja menjadi 35 dokumen dengan alokasi anggaran Rp4.627.435.000,00. Penambahan target dokumen dikarenakan adanya rincian perhitungan dari laporan eselon 1, laporan semesteran dan tahunan, laporan keuangan triwulan, laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan *audited* untuk satker di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Perealisasian target indikator kinerja didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan dan Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subbag)
5	IKK.3.2019.1.5. Dokumen Pengelolaan dan Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Koordinasi/Konsultasi/Pengurusan Administrasi Keuangan	309.830.000	Subbagian Keuangan
		Asistensi dan Pembinaan Pengelolaan APBN (Tata Kelola, Pencairan, Pelaksanaan dan Pelaporan)	812.335.000	Subbagian Keuangan
		Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Negara	1.087.846.000	Subbagian Keuangan
		SPEM Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawas/Pemeriksa	345.215.000	Subbagian Keuangan
		Rekonsiliasi Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawas/Pemeriksa	294.274.000	Subbagian Keuangan
		Workshop Permasalahan PNB	530.873.000	Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
		Pelaksanaan SPI	121.800.000	Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
		Penyusunan program, penyusunan laporan pemantauan tim SPI terhadap pengelolaan anggaran Satker dan penyusunan laporan akhir tim SPI	85.568.000	Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
		Pemantauan TIM SPI Terhadap pengelolaan anggaran satker dan penyusunan laporan akhir TIM SPI	227.784.000	Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
		Penyusunan Laporan Triwulanan (I & III) SAI	157.370.000	Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subbag)
		Penyusunan LK Penutup dan LK Likuidasi Satker Dekonsentrasi	654.540.000	Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

**F. Dokumen Hukum dan Tatalaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (SPM-NSPK)**

Target indikator kinerja Dokumen Hukum dan Tatalaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam perjanjian kinerja awal tahun 2017 sebesar 12 dokumen dengan alokasi anggaran Rp9.468.806.000,00. Setelah dilakukan revisi, target indikator kinerja dan alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi 67 dokumen dengan alokasi anggaran Rp8.433.317.000,00. Target dokumen bertambah dikarenakan telah diundangkannya 5 Permendikbud dan 57 Perdirjen PAUD dan Dikmas. Perealisasi indikator kinerja didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Kegiatan dan Anggaran Hukum dan Tatalaksana Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (SPM-NSPK)**

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subbag)
6	3.2019.1.6. Dokumen Hukum dan Tatalaksana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (SPM-NSPK)	Sinkronisasi Program Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	279.245.000	Subbagian Hukum
		Penyusunan dan Uji Publik Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang PAUD dan Dikmas	1.370.450.000	Subbagian Hukum
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang	436.392.000	Subbagian Hukum

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subbag)
		PAUD dan Dikmas		
		Fasilitasi Bantuan Hukum dan Permasalahan Hukum Bidang PAUD dan Dikmas	931.690.000	Subbagian Hukum
		Penyusunan Regulasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Pendidikan	6.000.000	Subbagian Hukum
		Koordinasi dan Harmonisasi Bidang Hukum Ditjen PAUD dan Dikmas	786.000.000	Subbagian Hukum
		Monitoring dan Evaluasi Hukum dan Perundang-undangan Bidang PAUD dan Dikmas	161.100.000	Subbagian Hukum
		Evaluasi Organisasi di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas	161.600.000	Subbag Tata Laksana
		Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan Publik Ditjen PAUD dan Dikmas	777.000.000	Subbagian Tata Laksana
		Manajemen ISO 9001:2016	236.800.000	Subbagian Tata Laksana
		Penyusunan Laporan Implementasi RBI di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas	155.950.000	Subbagian Tata Laksana



No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subbag)
		Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas	1.420.750.000	Subbagian Tata Laksana
		Pembakuan Model Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	8.000.000	Subbagian Tata Laksana
		Sosialisasi Rincian Tugas UPT BP PAUD dan Dikmas	506.090.000	Subbagian Tata Laksana
		Koordinasi dan Harmonisasi Bidang Tata Laksana Ditjen PAUD dan Dikmas	903.600.000	Subbagian Tata Laksana
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan dan Penguatan Organisasi Ditjen PAUD dan Dikmas	97.600.000	Subbagian Tata Laksana
		Gerakan Literasi Nasional	195.050.000	Subbagian Tata Laksana

#### **G. Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Dalam perjanjian kinerja pada awal tahun 2017, jumlah kepegawaian dan pembinaan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditargetkan sebesar 6 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.943.250.000,00. Setelah dilakukan revisi, target kinerja berubah menjadi 34 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.745.600.000,00. Bertambahnya

target dokumen dan anggaran dikarenakan adanya tambahan 21 UPT (BP-PAUD dan Dikmas) yang baru. Perealisasian indikator kinerja didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.7 Kegiatan dan Anggaran Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subbag)
7	3.2019.1.7. Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Analisis Kebutuhan Formasi Pegawai Tahun 2018	412.700.000	Subbagian Kepegawaian
		Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas	109.650.000	Subbagian Kepegawaian
		Pelantikan, Sumpah/Janji Jabatan atau PNS, serta Serah Terima Jabatan	488.500.000	Subbagian Kepegawaian
		Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	1.566.950.000	Subbagian Kepegawaian
		Badan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan dan Kepangkatan	95.000.000	Subbagian Kepegawaian
		Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	68.550.000	Subbagian Kepegawaian
		Koordinasi dan Harmonisasi Bidang Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	809.600.000	Subbagian Kepegawaian
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	344.400.000	Subbagian Kepegawaian
		Pengembangan Aplikasi kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	850.250.000	Subbagian Kepegawaian

#### H. Dokumen Kerja Sama, Kehumasan, dan Publikasi

Target indikator kinerja dokumen pelaksanaan kerja sama, kehumasan, dan publikasi dalam perjanjian kinerja awal tahun 2017 adalah sebesar 1 dokumen dengan alokasi anggaran Rp18.810.130.000,00. Target indikator kinerja dan alokasi anggaran mengalami perubahan setelah revisi menjadi 11 dokumen dengan alokasi anggaran Rp16.707.430.000,00. Bertambahnya target dokumen dikarenakan adanya penambahan kegiatan pameran dan telah terbentuknya Pangkalan Saka Widya Budaya Bakti di UPT PAUD dan Dikmas. Perealisasian indikator kinerja didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Kegiatan dan Anggaran Pelaksanaan Kerja Sama, Kehumasan, dan Publikasi**

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subag)
8	3.2019.1.8. Dokumen Kerjasama, Kehumasan, dan Publikasi	Penyusunan Naskah Warta PAUD dan Dikmas (Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Ditjen PAUD dan Dikmas)	1.380.720.000	Subagian Kerja Sama
		Penyelenggaraan Konferensi Pers	114.200.000	Subagian Kerja Sama
		Penyusunan Bahan Publikasi Bidang PAUD dan Dikmas	2.662.900.000	Subagian Kerja Sama
		Verifikasi dan Validasi Data Lembaga, Tenaga Kerja, dan Peserta Didik Asing pada Bidang PAUD dan Dikmas	416.350.000	Subagian Kerja Sama
		Pengolah Data Evaluasi Lembaga Asing (IMTA & RPTKA) Bidang PAUD dan Dikmas	122.000.000	Subagian Kerja Sama
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja dan Peserta Didik pada Bidang PAUD dan Dikmas	85.000.000	Subagian Kerja Sama
		Sosialisasi Kerja Sama Program PAUD dan	723.300.000	Subagian Kerja Sama

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subag)
		Dikmas Regional Timur		
		Sosialisasi Kerja Sama Program PAUD dan Dikmas Regional Barat	787.150.000	Subagian Kerja Sama
		Fasilitasi Kerja Sama antar Instansi/Lembaga	880.850.000	Subagian Kerja Sama
		Fasilitasi Pelaksanaan Tanggap Darurat	663.000.000	Subagian Kerja Sama
		Fasilitasi Penyelenggaraan Program PAUD dan Dikmas melalui TMMD	415.000.000	Subagian Kerja Sama
		Pameran dan Promosi	2.789.000.000	Subagian Kerja Sama
		Fasilitasi Penyelenggaraan Program PAUD dan Dikmas melalui Evaluasi Perjanjian Kerjasama	262.500.000	Subagian Kerja Sama
		Sosialisasi Penyelenggaraan Program PAUD dan Dikmas melalui Unit Layanan Terpadu di 29 UPT	463.060.000	Subagian Kerja Sama
		Workshop Kehumasan dan Jurnalistik	410.250.000	Subagian Kerja Sama
		Fasilitasi Pengembangan Model PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah	275.850.000	Subagian Kerja Sama
		Pelantikan Pangkalan SAKA	74.700.000	Subagian Kerja Sama
		Sosialisasi SWBB Nasional	756.000.000	Subagian Kerja Sama
		Pelatihan Kursus Mahir Dasar Pramuka	1.615.900.000	Subagian Kerja Sama
		Pelatihan Instruktur dan Pamong SAKA WBB	1.538.700.000	Subagian Kerja Sama

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subbag)
		Jambore Pramuka International	271.000.000	Subagian Kerja Sama

#### I. SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan Kompetensi dan/atau Kualifikasinya

Target indikator kinerja SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasinya pada awal tahun 2017 belum ditetapkan. Setelah dilakukan revisi perjanjian kinerja SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasinya, target kinerja menjadi 200 orang dengan alokasi anggaran Rp3.941.083.000,00. Perealisasian indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.9 Kegiatan dan Anggaran SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan Kompetensi dan/atau Kualifikasinya**

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subbag)
9	3.2019.1.9. SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan Kompetensi dan/atau Kualifikasinya	Pengembangan Aplikasi Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	850.250.000	Subbagian Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat II	68.522.000	Subbagian Kepegawaian
		Peningkatan Kapasitas Kepala BP PAUD dan Dikmas	171.255.000	Subbagian Kepegawaian
		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	319.450.000	Subbagian Kepegawaian
		Peningkatan Kapasitas Pamong Belajar	1.041.200.000	Subbagian Kepegawaian
		Peningkatan Kompetensi Pegawai Ditjen	541.150.000	Subbagian Kepegawaian

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subbag)
		PAUD dan Dikmas		
		Sosialisasi Inpassing dan Pedoman Formasi Pamong Belajar	658.250.000	Subbagian Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Non Klasikal	662.746.000	Subbagian Kepegawaian
		Peningkatan Kapasitas Pengelola Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	478.510.000	Subbagian Kepegawaian

**J. Dokumen Pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Target indikator kinerja dokumen pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan-undangan yang berlaku dalam perjanjian kinerja awal tahun 2017 sebesar 1 dokumen (13 satker) dengan alokasi anggaran Rp12.458.683.000,00. Setelah dilakukan revisi, target indikator kinerja dan alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi 1 dokumen (34 satker) dengan alokasi anggaran Rp5.293.352.000,00. Adanya penambahan target dokumen dikarenakan bergabungnya 21 UPT (BP-PAUD dan Dikmas) yang baru. Indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.10 Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subag)
10	IKK.3.2019.1.10. Dokumen Pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan	Bimbingan Teknis Aplikasi SAI dan SIMAK BMN	1.272.035.000	Subbagian Barang Milik Negara
		Rekonsiliasi Barang yang Menghasilkan Aset	6.910.000	Subbagian Barang Milik Negara



No	Pencapaian IKK	Kegiatan	Anggaran	Pengendali (Subag)
	Perundang-undangan yang Berlaku	Penyusunan Laporan Bulanan SAI dan SIMAK BMN	86.000.000	Subbagian Barang Milik Negara
		Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan SAI dan SIMAK BMN Satker Sekretariat	85.360.000	Subbagian Barang Milik Negara
		Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan SAI dan SIMAK BMN Eselon I	1.444.820.000	Subbagian Barang Milik Negara
		Penyusunan Laporan Audited SAI dan SIMAK BMN	83.055.000	Subbagian Barang Milik Negara
		FGD Percepatan Penghapusan BMN	281.184.000	Subbagian Barang Milik Negara
		FGD Efektivitas e-Tendering Cepat	312.093.000	Subbagian Barang Milik Negara
		FGD Permasalahan Aset Tanah dan Bangunan	59.180.000	Subbagian Barang Milik Negara
		Bimtek Implementasi Penataan Aset Berbasis TIK	422.081.000	Subbagian Barang Milik Negara
		Pendampingan Pengadaan Berbasis TIK	157.394.000	Subbagian Barang Milik Negara
		Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Milik Negara	446.051.000	Subbagian Barang Milik Negara
		Pemutakhiran Data BMN	478.389.000	Subbagian Barang Milik Negara
		Penghapusan BMN	158.800.000	Subbagian Barang Milik Negara

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun di awal tahun 2017, Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas bertugas untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terdapat satu sasaran strategis yang harus dipenuhi yakni meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, dapat dilihat dari pencapaian sepuluh indikator kinerja kegiatan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas.

Sesuai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan, output dan *outcome* dari 10 IKK terlaksana melebihi target sehingga *score* mencapai 100%.



Gambar 3.1 Chart hasil penilaian 10 IKK

Keterangan : Gambar 3.1: Chart hasil penilaian 10 IKK

	<b>Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas</b>
IKK.3.2019.1.1	Dokumen Data dan Informasi PAUD dan Dikmas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPT
IKK.3.2019.1.2	Kabupaten/Kota melaksanakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
IKK.3.2019.1.3	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas
IKK.3.2019.1.4	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas
IKK.3.2019.1.5	Dokumen Pengelolaan dan Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
IKK.3.2019.1.6	Dokumen Hukum dan Tatalaksana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (SPM-NSPK)
IKK.3.2019.1.7	Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
IKK.3.2019.1.8	Dokumen Kerjasama, Kehumasan, dan Publikasi
IKK.3.2019.1.9	SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan Kompetensi dan/atau Kualifikasinya
IKK.3.2019.1.10	Dokumen Pengelolaan BMN Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Berdasarkan gambar 3.1 tentang chart hasil penilaian 10 indikator kinerja dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan indikator kinerja sudah mencapai target, bahkan terdapat satu indikator kinerja yang realisasinya lebih dari 100%.

Sasaran Strategis Kegiatan, “Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas” tingkat ketercapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Capaian Indikator Kinerja “Dokumen Data dan Informasi PAUD dan Dikmas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPT”**

Pada tahun 2017, target kinerja dokumen data dan informasi PAUD dan Dikmas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPT ditargetkan sebanyak 611 dokumen. Setelah diukur pencapaiannya, target kinerja terealisasi sebanyak 611 dokumen atau dengan persentase sebesar 100%. Pencapaian target kinerja dikarenakan adanya 514 kab/kota, 34 Provinsi dan 29 UPT telah mengikuti Rakor Dapodik; semua satuan pendidikan di kab/kota telah mengisi dan memperbaiki Dapodik; dan adanya kegiatan penyelenggaraan SEAMEO CECCEP. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator kinerja dapat dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1 Jumlah Dokumen Data dan Informasi PAUD dan Dikmas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPT**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Tahun 2016		Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Dokumen Data dan Informasi PAUD dan Dikmas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPT	545 dokumen	545 dokumen	545 dokumen	611 dokumen	611 dokumen	100,00

Meskipun sudah mencapai target namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan yaitu (1) masih ada beberapa kab/kota yang belum memiliki SDM yang memiliki kompetensi, (2) masih lemahnya koordinasi pengelolaan data di tingkat kab/kota, (3) SEAMEO CECCEP belum memiliki tata kelola, struktur organisasi dan *job description* (4) 21 UPT (BP-PAUD dan Dikmas) baru belum memiliki tenaga profesional dalam mengelola data.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi/solusi yang akan dilakukan adalah (1) melakukan pendidikan dan pelatihan yang diperuntukan guna meningkatkan



Gambar 3.2 Dirjen PAUD dan Dikmas Pada Saat Memberikan Arahan dan Membuka Kegiatan Seminar Internasional SEAMEO CECCEP

kapasitas pegawai, (2) memberikan bimbingan khusus pada daerah 3T dan daerah-daerah yang bermasalah dalam pengelolaan data; (3) melakukan pembinaan SEAMEO CECCEP bersama Sekretariat SEAMEO Centre; (4) melakukan assessment pegawai dan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk pegawai. Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dan pada tahun 2017 capaian kinerjanya 100%.

## 2. Capaian Indikator Kinerja “Kabupaten/Kota Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan”

Pada tahun 2017, target kinerja Jumlah kabupaten/kota melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan ditargetkan sebanyak 50 kabupaten/kota. Setelah diukur pencapaiannya, target kinerja terealisasi sebanyak 60 kabupaten/kota atau dengan persentase sebesar 120%.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dan pada tahun 2017 capaian kinerja sebesar 120%, maka terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 20%. Peningkatan capaian disebabkan oleh pelaksanaan PUG di kab/kota melebihi dengan target yang ditetapkan. Sedangkan jika di bandingkan dengan target akhir renstra tahun 2019 sebesar 511 kabupaten/kota, pencapaian realisasi sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 410 kabupaten/kota. Sisa target sebanyak 101 kabupaten/kota akan di upayakan tercapai pada tahun 2018 dan 2019. Untuk lebih jelasnya melihat capaian indicator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2 Kabupaten/Kota Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Tahun 2016		Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Jumlah Kabupaten/ Kota Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	511 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	120

Keberhasilan pencapaian realisasi indikator ini dikarenakan terlaksananya koordinasi PUG di tingkat pusat dan daerah dapat sesuai dengan rencana. Selain itu, untuk mendukung ketercapaian indikator ini dilakukan uji petik di 10 kab/kota (kab. Tasimalaya, kab. Banyuwangi, kab. Sragen, Kab. Lumajang, Kab. Purworejo, Kab. Jepara, Kab. Bone, Kab. Indramayu, Kab. Lombok Timur, Kab. Hulu Sungai Utara). Pencapaian indikator tersebut membutuhkan komitmen semua pihak terutama pejabat/pimpinan pada setiap unit kerja.

Meskipun target kinerja telah terealisasi melebihi target namun dalam pelaksanaannya masih di temukan hambatan dan permasalahan, yaitu: (1) Tidak semua daerah terutama kab/kota memberikan perhatian khusus pada PUG bidang pendidikan, hal ini ditandai dengan kurangnya dukungan APBD dan integrasi PUG dalam program pendidikan; (2) Pemahaman Gender dan Pengarusutamaan *gender* pada para pengambil kebijakan dan stakeholder di bidang pendidikan belum merata; (3) Sebagian besar dinas pendidikan Kab/Kota belum memiliki data terpilah; dan (4) Implementasi Pengarusutamaan Gender pada satuan pendidikan belum optimal.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut yaitu: (1) membuat kelompok kerja PUG bidang Pendidikan di kab/kota; (2) melakukan sosialisasi atau rapat koordinasi terkait dengan pengarusutamaan gender; (3) selalu memperbaharui atau meningkatkan kualitas dari sistem/aplikasi Dapodik; (4) melakukan koordinasi dan sinkronisasi program PUG bidang pendidikan.

### 3. Capaian Indikator kinerja “Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas”

Pada tahun 2017, target kinerja jumlah dokumen program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas ditargetkan sebanyak 581 dokumen. Setelah diukur pencapaiannya, target kinerja terealisasi sebanyak 581 dokumen atau sebesar 100%. Pencapaian target kinerja dikarenakan adanya 514 kab/kota, 34 Provinsi dan 29 UPT yang mendapatkan sosialisasi kebijakan program PAUD dan Dikmas; Sosialisasi DAK Fisik maupun Non Fisik, bekerja sama dengan 34 Provinsi yang mendapat tugas perbantuan.

**Tabel 3.3 Jumlah Dokumen Program Dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Tahun 2016		Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas	47 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	581 dokumen	581 dokumen	100



Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2017 tidak terdapat peningkatan capaian kinerja, dimana tahun 2016 dan tahun 2017 sama-sama mencapai target sebesar 100%. Pencapaian target kinerja sebesar 100% didukung oleh:

- a. Adanya upaya yang terus dilakukan oleh Setditjen PUAD dan Dikmas dalam memberikan arahan dan pembinaan terkait pengelolaan/manajemen kepada UPT PAUD dan Dikmas;
- b. Kabupaten/Kota memperoleh dan memahami kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017, misalnya terkait penyaluran DAK, akreditasi satuan pendidikan, SKB menjadi satuan pendidikan, ujian nasional yang diikuti oleh warga belajar yang memperoleh NPSN;
- c. Adanya asistensi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Ditjen PAUD dan Dikmas yang dilaksanakan pada penyusunan program, revisi anggaran, dan penelaahan anggaran lainnya.

Meskipun sudah mencapai target, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti penyesuaian target waktu pelaksanaan kegiatan antar setiap satker yang ada di lingkungan Ditjen PAUD dan



Gambar 3.3 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017 Tahap I di Padang

Dikmas. Selain itu SDM yang dimiliki masih minim terutama yang menangani program dan anggaran. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut dengan cara memantapkan komitmen pada saat kegiatan penyusunan program pada awal tahun anggaran, melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan

hal-hal yang berkaitan dengan program dan anggaran di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas.

#### 4. Capaian Indikator Kinerja “Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program Dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas”

Pada tahun 2017, target kinerja Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas ditargetkan sebanyak 577 dokumen. Setelah diukur pencapaiannya, target kinerja terealisasi sebanyak 577 dokumen atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017 terdapat penambahan target indikator yang telah disesuaikan dengan adanya penambahan 21 UPT (BP-PAUD dan Dikmas) di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dan pada tahun 2017 capaian kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2017 capaian kinerja tidak mengalami peningkatan/penurunan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Tahun 2016		Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas	47 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	577 dokumen	577 dokumen	100

Capaian kinerja 100% pada tahun 2017 didukung oleh adanya peningkatan kapasitas kinerja pada 34 Satker. Selain itu, terdapat 514 kab/kota, 34 Provinsi dan 29 UPT yang mengikuti koordinasi evaluasi pelaksanaan program dan mendapatkan asistensi penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan program. Meskipun sudah mencapai target, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja, yaitu (1) adanya banyak aplikasi untuk pelaporan; (2) kurangnya SDM yang menangani menyebabkan

sering terjadinya keterlambatan pelaporan; (3) Ada beberapa sistem yang sering mengalami *maintenance* yang menyebabkan data pelaporan kurang update dan kurang akurat.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipatif yang dilakukan adalah (1) memberikan asistensi dan bimbingan teknis yang terkait dengan penggunaan aplikasi yang ada, terutama aplikasi pelaporan; (2) mengajukan permintaan untuk menambah pegawai baik PNS maupun tenaga kontrak non PNS yang profesional; (3) sering melakukan koordinasi dengan pusat terkait dengan pelaporan jika mengalami kesulitan dan juga membuat back up data manual untuk pelaporannya.

#### 5. Indikator Kinerja “Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”

Pada tahun 2017, target kinerja Jumlah dokumen pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditargetkan sebanyak 35 dokumen. Setelah diukur pencapaiannya, target kinerja terealisasi sebanyak 35 dokumen atau dengan persentase sebesar 100%.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dan pada tahun 2017 capaian kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2017 capaian kinerja tidak mengalami peningkatan/penurunan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5 Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Tahun 2016		Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	13 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	35 dokumen	35 dokumen	100

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi penambahan target

indikator yang disesuaikan dengan penambahan Satker di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Pencapaian kinerja sebesar 100% didukung dengan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Indonesia (SAI) eselon I Pusat dan Laporan SAI satker daerah baik triwulan, semester maupun tahunan.

Walaupun sudah mencapai target namun masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi diantaranya : (1) terbatasnya SDM baik dalam hal kuantitas maupun kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan pada 21 Satker UPT baru; (2) kurangnya koordinasi internal antara pejabat pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran, operator SAK dan operator SIMAK BMN yang mengakibatkan penyusunan laporan keuangan seringkali terjadi kesalahan pencatatan maupun kesalahan penyajian dalam penyusunan neraca SAK, neraca BMN, maupun persediaan; (3) perubahan aplikasi baik penyusunan keuangan maupun aplikasi SIMAK BMN yang sangat cepat belum dapat diikuti oleh SDM yang ada di UPT yang baru; (4) perlakuan KPPN di satu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain yang mengakibatkan proses e-rekon tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan seluruh satker yang ada di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala diantaranya adalah (1) bagian keuangan dan BMN telah membuka klinik permasalahan penyusunan



Gambar 3.4 Kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Keuangan yang di gelar di Hotel Horison Bekasi

laporan keuangan dan laporan barang milik negara. Klinik yang dimaksud adalah bagian keuangan dan BMN membuka akses setiap permasalahan penyusunan laporan keuangan dan BMN kepada satker di lingkungan Ditjen PAUD dan

Dikmas melalui media elektronik seperti WA, email, dan telepon. (2) apabila klinik permasalahan seperti yang dimaksudkan dengan butir 1 belum bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan yang ada di UPT, bagian keuangan dan BMN memberikan asistensi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan dan BMN sekaligus pertanggungjawaban keuangan dengan menerjunkan SDM dari bagian Keuangan dan BMN kepada UPT yang memerlukan pendampingan secara langsung; (3) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan untuk mensosialisasikan setiap perubahan aplikasi penyusunan laporan keuangan dan BMN dari Kementerian Keuangan maupun untuk mensosialisasikan kebijakan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, kebijakan penyusunan laporan keuangan dan BMN di lingkungan kemdikbud maupun kebijakan penyusunan laporan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas; (4) melakukan fasilitasi permasalahan yang dihadapi satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas dengan KPPN setempat melalui komunikasi langsung kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Kekayaan Negara (Direktorat terkait seperti Direktorat APK, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Kementerian Keuangan.

#### **6. Indikator kinerja “Dokumen Hukum dan Tatalaksana Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (SPM-NSPK)”**

Pada awal tahun 2017, target kinerja Jumlah Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Tata Laksana ditargetkan sebanyak 18 dokumen. Setelah revisi target indikator kinerja menjadi 67 dokumen. Setelah diukur pencapaiannya, target kinerja terealisasi sebanyak 67 dokumen atau sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2016, adanya penambahan sasaran target di tahun 2017 tidak menghalangi dalam pencapaian kinerja 100%. Hal ini didukung dengan terintegrasinya hubungan tata kerja antar satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang hukum dan tatalaksana yang efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6 Jumlah Dokumen Hukum dan Tatalaksana Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (SPM-NSPK)**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Tahun 2016		Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Dokumen Hukum dan Tatalaksana Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (SPM-NSPK)	21 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	67 dokumen	67 dokumen	100

Meskipun sudah mencapai target namun masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi seperti (1) penyesuaian target waktu pelaksanaan kegiatan antar setiap satker yang ada di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas; (2) Selain itu SDM yang dimiliki masih minim terutama yang menangani hukum dan tatalaksana; (3) sulit melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dari instansi terkait.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah dengan (1) menyusun tata hubungan kerja dan koordinasi antar satuan kerja dilingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Walaupun untuk awal pelaksanaan penyusunan tata hubungan kerja ini mendapatkan kesulitan karena memiliki prosedur kerja yang berbeda, hal ini bisa terlaksana secara efektif dan efisien melalui koordinasi secara intensif; (2) membuat permintaan pegawai terutama yang mengerti dan paham hukum dan tatalaksana; (3) melakukan koordinasi baik dengan instansi yang berada di naungan Ditjen PAUD dan Dikmas, maupun instansi lainnya yang terkait.

#### **7. Indikator Kinerja “Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”**

Pada tahun 2017, target kinerja Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku sebanyak 34 dokumen. Setelah diukur pencapaiannya, target kinerja terealisasi sebanyak 34 dokumen atau dengan persentase sebesar 100%.

Penambahan target kinerja pada tahun 2017 yang semula hanya 6

dokumen dan menjadi 34 dokumen, hal ini disebabkan adanya penambahan 21 UPT (BP-PAUD dan Dikmas) baru. Untuk mendukung pencapaian kinerja telah dilaksanakan Baperjakat, *talent mapping*, inpassing pamong belajar, rotasi, mutasi, pegawai pensiun, CPNS dan promosi.

Jika dibandingkan tahun 2016, terdapat pengurangan sasaran target pada tahun 2017, yaitu 34 dokumen. Dibandingkan target tahun 2016 sebanyak 47 dokumen. Hal ini dikarenakan adanya tambahan 21 UPT (BP-PAUD dan Dikmas) baru yang merupakan konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, target pada tahun 2017 diturunkan menjadi 34 dokumen karena lebih difokuskan melakukan pembinaan kepada 21 UPT (BP-PAUD dan Dikmas) yang baru bergabung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.7 Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Tahun 2016		Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	13 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	34 dokumen	34 dokumen	100

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja ini disebabkan oleh: (1) terbatasnya SDM baik dalam hal kuantitas maupun kompetensi; (2) kurangnya koordinasi antara 21 UPT baru (BP-PAUD dan Dikmas) dengan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas; (3) pelaksanaan yang terkonsentrasi pada satu program prioritas sehingga menyebabkan program lain lambat dalam eksekusi pelaksanaannya khususnya pada 21 UPT baru (BP-PAUD dan Dikmas).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu: (1) melakukan peningkatan kompetensi SDM dan melakukan inpassing untuk jabatan fungsional pamong belajar; (2) meningkatkan koordinasi antara 21 UPT baru (BP-PAUD dan Dikmas) dan sekretariat dengan menyusun dan mensosialisasikan prosedur kerja dan tata hubungan kerja; (3) memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai



dan pimpinan pada 21 UPT baru (BP-PAUD dan Dikmas).

## 8. Indikator Kinerja “Dokumen Kerja Sama, Kehumasan, dan Publikasi”

Pada tahun 2017, target kinerja Dokumen kerja Sama, kehumasan, dan publikasi ditargetkan sebanyak 11 dokumen. Setelah diukur pencapaiannya, target kinerja terealisasi sebanyak 11 dokumen atau dengan persentase sebesar 100%. Pencapaian kinerja didukung dengan adanya unit layanan terpadu untuk PAUD dan Dikmas pada satuan kerja di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, Satuan Kerja Ditjen PAUD dan Dikmas juga sudah melakukan promosi, pameran dan publikasi melalui media cetak dan elektronik.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016, terdapat pengurangan sasaran target pada tahun 2017, yaitu menjadi 11 dokumen. Hal ini dikarenakan adanya 21 UPT baru yang merupakan konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berikut beberapa dokumentasi terkait dengan indikator kinerja:

**Tabel 3.8 Jumlah Dokumen Kerjasama, Kehumasan, dan Publikasi**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Tahun 2016		Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Dokumen Kerjasama, Kehumasan, dan Publikasi	11 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100

Walaupun target kinerja sudah mencapai target, masih ada kendala/permasalahan yang terjadi, adanya keterlambatan publikasi beberapa kegiatan Ditjen PAUD dan Dikmas melalui advetorial (media cetak) dan belum semua UPT membentuk Pangkalan Saka Widya Budaya Bakti.



Gambar 3.5 upacara pembukaan Raimuna Nasional (Rainas) Tahun 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala diantaranya: (1)



menyiapkan bahan kegiatan Ditjen PAUD dan Dikmas yang akan dipublikasi lebih awal; (2) membentuk Pangkalan Saka Widya Budaya Bakti di UPT yang belum ada.

#### 9. Indikator Kinerja “SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan Kompetensi dan/atau Kualifikasinya”

Pada tahun 2017, target kinerja SDM Ditjen PAUD dan Dikmas meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasinya sebanyak 200 orang. Setelah diukur pencapaiannya, target kinerja terealisasi sebanyak 200 orang atau dengan persentase sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terealisasi sebanyak 47 orang, pada tahun 2017 terdapat penambahan target indikator yang telah disesuaikan dengan adanya penambahan 21 UPT di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.9 Jumlah SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan Kompetensi dan/atau Kualifikasinya**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Tahun 2016		Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan Kompetensi dan/atau Kualifikasinya	117 orang	47 orang	47 orang	200 orang	200 orang	100

Capaian kinerja 100% didukung dengan adanya integrasi data kepegawaian, adanya arahan dan binaan dalam pengelolaan UPT, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi, peningkatan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jabatannya masing-masing.

Walaupun sudah mencapai target namun masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi seperti terbatasnya SDM baik dalam hal kuantitas maupun kompetensi pada 21 Satker UPT baru, hal ini menyebabkan banyaknya pegawai yang mengurus rincian tugas beberapa jabatan pelaksana dan berpengaruh kepada penentuan pegawai yang akan ditingkatkan kompetensinya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala ini adalah: (1) membuka

peluang kepada pegawai negeri sipil di luar pegawai Ditjen PAUD dan Dikmas untuk mengusulkan mutasi menjadi pegawai Ditjen PAUD dan Dikmas yang akan ditempatkan pada 21 UPT baru; (2) membuka peluang kepada pegawai negeri sipil Ditjen PAUD dan Dikmas yang berada pada Sekretariat, Direktorat maupun 8 UPT lama dilingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas untuk mengusulkan mutasi menjadi pegawai Ditjen PAUD dan Dikmas yang akan ditempatkan pada 21 UPT baru; (3) melakukan inpassing bagi PNS yang berada pada Ditjen PAUD dan Dikmas ataupun instansi lain untuk menduduki jabatan fungsional pamong belajar pada 21 UPT baru. Sehingga setelah melakukan upaya-upaya diatas, distribusi rincian tugas jabatan akan lebih merata walaupun masih ada beberapa pegawai yang merangkap jabatan pelaksana yang berakibat kepada penentuan peningkatan kompetensi pegawai akan semakin efektif dan efisien.

#### 10. Indikator kinerja “Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”

Pada tahun 2017, target kinerja Jumlah dokumen Pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditargetkan sebanyak 1 dokumen (34 Satker). Setelah diukur pencapaiannya, target kinerja terealisasi sebanyak 1 dokumen (34 Satker) atau dengan persentase sebesar 100%.

**Tabel 3.10 Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Tahun 2016		Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	12 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dan pada tahun 2017 capaian kinerja sebesar 100% maka pada tahun 2017 capaian kinerja tidak mengalami peningkatan/penurunan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan target yang

ditetapkan.

Meskipun pencapaiannya sudah memenuhi target namun ada kendala yang dihadapi, seperti: (1) keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi barang dan jasa yang mengakibatkan keterlambatan dalam menerbitkan SK ULP tingkat Direktorat Jenderal, selain itu juga membawa dampak satker seringkali mengajukan perubahan SDM yang semula diusulkan menjadi panitia pengadaan barang dan jasa diubah menjadi pejabat perbendaharaan seperti halnya PPK; (2) keterlambatan satuan kerja dalam mendownload DIPA dari Kanwil DJPB mengakibatkan keterlambatan dalam menyusun RUP, hal ini karena RUP menurut ketentuan harus disusun sebelum tahun anggaran berjalan; (3) Keterbatasan SDM di Satker Setditjen PAUD dan Dikmas dalam memberikan bimbingan maupun asistensi penatausahaan BMN, pengadaan barang dan jasa, dan pelaporan BMN yang berakibat satuan kerja terlambat dalam menyusun dokumen barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya untuk mengatasi: (1) menyampaikan surat edaran Direktur Jenderal kepada satuan kerja (UPT) yang tidak memiliki SDM yang bersertifikasi barang dan jasa agar melakukan koordinasi dan kerja sama dengan satuan kerja di wilayahnya untuk diusulkan menjadi kelompok kerja ULP; (2) melakukan peningkatan pengelola barang dan jasa dengan mengusulkan mengikuti Diklat pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Biro Umum Sekjen Kemdikbud. (3) mendorong Satker agar menginstruksikan pegawainya yang akan dijadikan sebagai pokja ULP maupun pejabat pengadaan untuk mengikuti ujian secara *online* yang diselenggarakan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa (LKPP); 4) memberikan bimbingan teknis dan asistensi berdasarkan skala prioritas kepada satker (UPT) yang lemah dalam hal barang dan jasa dan pengelolaan barang milik negara; (5) membuka klinik permasalahan pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan barang milik negara media sosial.

Selain realisasi ke sepuluh indikator kinerja tersebut, ada 2 indikator kinerja yang tidak diperjanjikan yaitu (1) jumlah dokumen kerumahtanggaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di targetkan sebanyak 1 dokumen

telah teralisasi 1 dokumen dengan persentase capaian 100%. Meskipun telah terealisasi 100% namun masih ada hambatan dan permasalahan yaitu: kurangnya kompetensi pegawai, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung layanan ke rumah tangga dan kurangnya koordinasi antar staf pimpinan dengan bagian rumah tangga, untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut upaya yang dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas kompetensi pegawai melalui diklat, melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung layanan ke rumah tangga, dan peningkatan koordinasi antar staf pimpinan. (2) jumlah dokumen ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di targetkan sebanyak 1 dokumen telah teralisasi 1 dokumen dengan persentase capaian 100%. Meskipun telah terealisasi 100% namun masih ada hambatan dan permasalahan yaitu: kurangnya kompetensi pegawai dalam membuat agenda surat berbasis elektronik, belum maksimalnya pemanfaatan *e-office*, sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan masih kurang, untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut upaya yang dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas kompetensi pegawai melalui diklat, mendorong satker dalam memanfaatkan surat berbasis elektronik (*e-office*), dan melengkapi sarana dan prasarana untuk kearsipan dan perpustakaan yang masih kurang.

## **B. Realisasi Anggaran**

Dari alokasi anggaran hasil revisi sebesar Rp235.787.141.000,00 yang di perjanjikan kinerja adalah sebesar Rp81.982.267.000,00. Dari anggaran tersebut didistribusikan ke 10 indikator kinerja dengan capaian realisasi sebagai berikut:

1. Dokumen Data dan Informasi PAUD dan Dikmas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPT, dialokasikan anggaran sebesar Rp18.694.532.000,00 terealisasi sebesar Rp16.607.497.532,00, dengan persentase capaian anggaran sebesar 88,84%, tidak tercapainya realisasi anggaran sesuai target disebabkan ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana hingga akhir tahun anggaran.
2. Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.570.415.000 terealisasi sebesar

Rp1.379.891.000, dengan persentase capaian anggaran sebesar 87,87%, tidak tercapainya realisasi anggaran sesuai target disebabkan tidak terealisasinya penyusunan buku, yang tadinya ditargetkan 4 buku, hanya terealisasi 2 buku.

3. Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas. Pada tahun 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp11.069.121.000,00 terealisasi sebesar Rp9.686.894.200,00 dengan persentase capaian sebesar 87,51%, tidak tercapainya realisasi anggaran sesuai target disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana seperti penyusunan buku yang ditargetkan sebanyak 7 buku, hanya terealisasi 1 buku.
4. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas. Pada tahun 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp6.899.982.000,00 terealisasi sebesar Rp6.371.641.700,00 dengan persentase capaian sebesar 92,34%.
5. Dokumen Pengelolaan dan Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. Pada tahun 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp4.627.435.000,00 terealisasi sebesar Rp4.569.844.162,00 dengan persentase capaian sebesar 98,76%.
6. Dokumen Hukum dan Tatalaksana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (SPM-NSPK). Pada tahun 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp8.433.317.000,00 terealisasi sebesar Rp7.652.936.500,00 dengan persentase capaian sebesar 90,75%. Ketidaktercapaiannya realisasi anggaran disebabkan oleh lambatnya pengesahan peraturan/perundangan-undangan dari instansi terkait, sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program hukum dan tatalaksana.
7. Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. Pada tahun 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp4.745.600.000,00 terealisasi sebesar Rp4.054.416.100,00 dengan persentase capaian sebesar 85,44%, ketidaktercapaiannya dikarenakan adanya keterkaitan dengan instansi lain, misalnya saja membuat peta jabatan yang harus

berkoordinasi dengan Menpan-RB, sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

8. Dokumen Kerjasama, Kehumasan, dan Publikasi. Pada tahun 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp16.707.430.000,00 terealisasi sebesar Rp16.139.712.604,00 dengan persentase capaian sebesar 96,60%. Alasan tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan oleh tidak terpublikasinya beberapa kegiatan Ditjen PAUD dan Dikmas melalui advetorial (media cetak).
9. SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan Kompetensi dan/atau Kualifikasinya. Pada tahun 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp3.941.083.000,00 terealisasi sebesar Rp3.734.519.800,00 dengan persentase capaian sebesar 94,76%.
10. Dokumen Pengelolaan BMN Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. Pada tahun 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp5.293.352.000,00 terealisasi sebesar Rp5.011.453.625,00 dengan persentase capaian sebesar 94,67%.

Untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan perjanjian kinerjanya, Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas, pada awal tahun 2017 menggunakan pagu anggaran sebesar Rp 519.278.479.000,00,-. Namun demikian dengan adanya revisi dan pemberlakuan *self-blocking* terhadap seluruh program dan pemisahan alokasi anggaran untuk kegiatan 21 UPT baru di lingkungan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, maka anggaran Setditjen PAUD dan Dikmas menjadi Rp235.787.141.000,00. Secara rinci alokasi anggaran dan perealisasiannya\* dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Serapan Anggaran Per Jenis Belanja**

No	Jenis Belanja	Pagu Awal	Self Blocking	Pagu Akhir	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Barang	337.926.859.000	203.297.036.000	122.699.933.000	100.665.788.179	82,04 %	22.034.144.821
2	Belanja Pegawai	171.038.950.000	52.500.000.000	98.005.523.000	82.162.096.588	83,84 %	15.843.426.412
3	Belanja Modal	10.312.670.000		15.081.685.000	13.943.821.240	92,46 %	1.137.863.760
4	Belanja Sosial						
	<b>TOTAL</b>	<b>519.278.479.000</b>	<b>255.797.036.000</b>	<b>235.787.141.000</b>	<b>196.771.706.007</b>	<b>83,45 %</b>	<b>39.015.434.993</b>

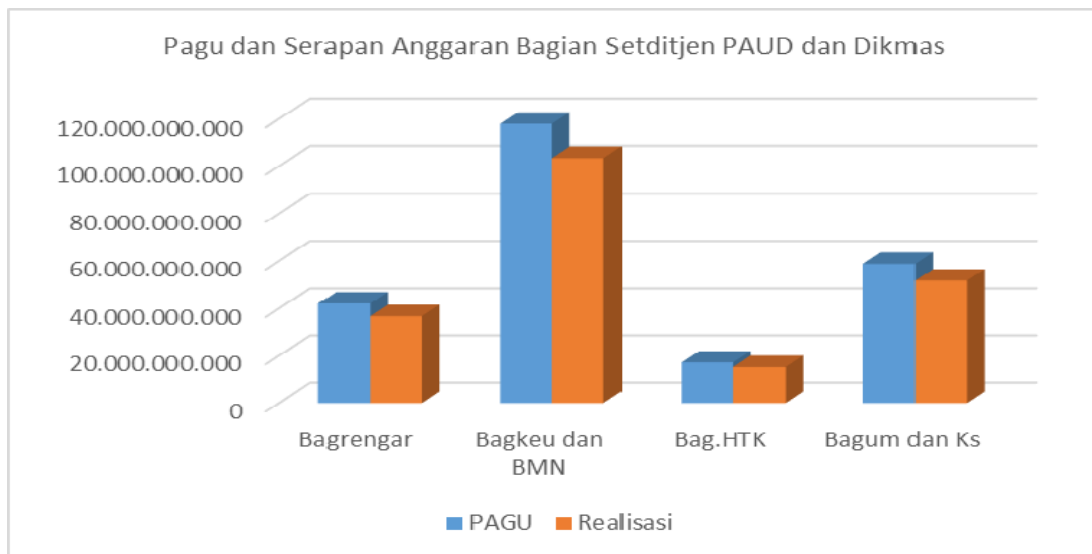
\*Hasil rekon tanggal 27 Januari 2018

Daya serap Setditjen PAUD dan Dikmas per kegiatan berdasarkan aplikasi monitoring laporan keuangan (MoLK) dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.12 Serapan Anggaran Per Kegiatan**

No	Jenis Belanja	Pagu Awal	Self Blocking	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Layanan Dukungan Manajemen Esselon I	89.044.295.000	0	81.368.468.878	91,38%	7.675.826.122
2	Layanan Internal Overhead	20.487.023.000	0	18.603.491.243	90,81%	1.883.531.757
3	Layanan Perkantoran	126.255.823.000	1.877.978.000	106.975.162.385	84,73%	19.280.660.615
	<b>TOTAL</b>	<b>235.787.141.000</b>	<b>1.877.978.000</b>	<b>206.947.122.506</b>	<b>87,77%</b>	<b>28.840.018.494</b>

Daya serap Setditjen PAUD dan Dikmas per Bagian dapat dirinci sebagai berikut:



**Gambar 3.6. Pagu dan Serapan Anggaran Setditjen PAUD dan Dikmas**

Dapat dilihat dari grafik terkait dengan pencapaian serapan anggaran Setditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017 :



**Gambar 3.7 Serapan anggaran Setditjen PAUD dan Dikmas**

Sisa anggaran yang tidak terserap berasal dari Anggaran Tunjangan Kinerja yang disebabkan oleh:

1. Data pegawai di 21 UPT PAUD dan Dikmas yang baru berubah jumlah, pangkat, dan jabatannya.
2. Disusunnya kelas jabatan di UPT PAUD dan Dikmas yang baru, sehingga belum diantisipasi dalam perhitungan tukin.
3. Semua pamong belajar dilakukan *asesment* sehingga banyak pamong yang turun *grade* dalam pemberian tunjangan kinerja.
4. Pemberian tukin pegawai di 21 UPT PAUD dan Dikmas hanya dapat diberikan mulai Bulan Februari sampai dengan Desember, sehingga tersisa 1 bulan yang tidak dapat dicairkan.



## **BAB IV PENUTUP**

Pada tahun 2017, capaian kinerja Setditjen PAUD dan Dikmas sebesar 100% yang merupakan akumulasi kinerja yang telah dihasilkan meliputi : (1) Dokumen Data dan Informasi PAUD dan Dikmas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPT terealisasi 611 dokumen dari target 611 dokumen dengan persentase kinerja 100%; (2) Kabupaten/Kota melaksanakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan terealisasi sebanyak 410 dokumen dari target 410 dokumen dengan capaian kinerja 120%; (3) Dokumen Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas terealisasi sebanyak 581 dokumen dari target 581 dokumen dengan capaian kinerja 100%; (4) Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas terealisasi 577 dokumen dari target 581 dokumen dengan capaian kinerja 100%; (5) Dokumen Pengelolaan dan Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku terealisasi 187 dokumen dari target 187 dokumen dengan capaian kinerja 100%; (6) Dokumen Hukum dan Tatalaksana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (SPM-NSPK) terealisasi 62 dokumen dari target 62 dokumen dengan capaian kinerja 100%; (7) Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku terealisasi 34 dokumen dari target 34 dokumen dengan capaian kinerja 100%; (8) Dokumen Kerjasama, Kehumasan, dan Publikasi terealisasi 25 dokumen dari target 25dokumen dengan capaian kinerja 100%; (9) SDM Ditjen PAUD dan Dikmas Meningkatkan Kompetensi dan/atau Kualifikasinya terealisasi 200 dokumen dari target 200 dokumen dengan capaian kinerja 100%; (10) Dokumen Pengelolaan BMN Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku terealisasi 74 dokumen dari target 74 dokumen dengan capaian kinerja 100%.

Berdasarkan capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa ada 9 IKK yang telah mencapai target indikator 100% dan 1 IKK telah mencapai target indikator di atas 100% yaitu 120%. Hal ini menunjukkan bahwa semua target indikator kinerja pada tahun 2017 telah tercapai.

Permasalahan dalam pelaksanaan program Setditjen PAUD dan Dikmas yang perlu segera diantisipasi antara lain: (1) Bergabungnya 21 UPT baru pada Ditjen PAUD dan Dikmas tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas SDM; (2) beberapa UPT baru belum memiliki gedung perkantoran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan; (3) belum terbentuknya pangkalan saka pada beberapa UPT (kalau bisa ditambahkan ya).

Ke depannya kebijakan yang akan dijalankan Setditjen PAUD dan Dikmas untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkan kinerja di titikberatkan pada : (1) peningkatan kapasitas SDM satuan kerja di Ditjen PAUD dan Dikmas melalui diklat; (2) memastikan setiap UPT baru memiliki gedung perkantoran; (3) melakukan koordinasi untuk membentuk pangkalan saka; (4) optimalisasi penatausahaan keuangan dan BMN, dan kinerja melalui pemanfaatan aplikasi yang sudah ada maupun membangun aplikasi baru; (5) seiring dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka akan dilakukan penyesuaian dan harmonisasi terhadap target dan indikator dalam renstra.

# LAMPIRAN





**Perjanjian Kinerja Tahun 2017**  
**Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

**TUGAS**

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

**FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, akan:

1. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. Mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. Mengelola data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. Mengkoordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. Mengkoordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
6. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
7. Melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
8. Mengelola kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
9. Mengkoordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
10. Mengelola barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
11. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

**TARGET CAPAIAN**

**PROGRAM: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

**KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PAUD DAN DIKMAS**

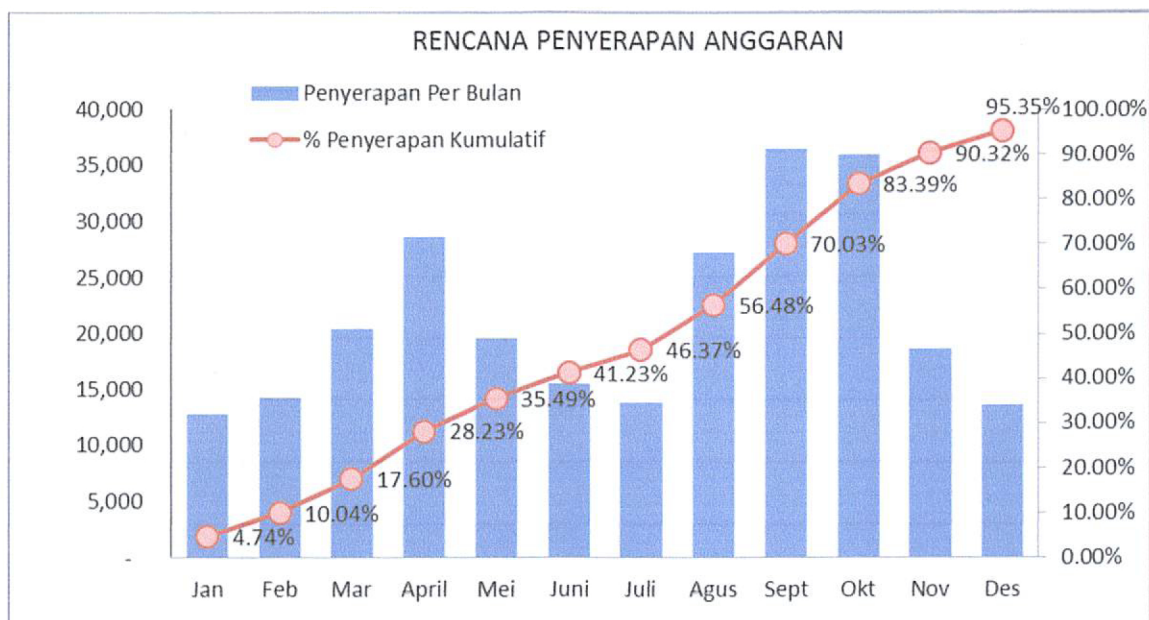
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017	
		TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas	Dokumen data dan informasi PAUD - Dikmas nasional, provinsi, kabupaten, dan kota	83 dokumen	13.147.530.000
	▪ Dokumen Pengelolaan Data	37 dokumen	5.847.455.000
	▪ Dokumen SIM PAUD dan Dikmas	40 dokumen	4.030.955.000
	▪ Dokumen Kesekretariatan	6 Dokumen	3.269.080.000
	Dokumen Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	3 Dokumen	2.456.240.000
	▪ Koordinasi PUG Bidang Pendidikan	1 Dokumen	343.060.000
	▪ Temu Koordinasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	1 dokumen	1.945.730.000
	▪ Penyusunan Juknis Bantuan Penguatan	1 dokumen	167.450.000
	Jumlah dokumen program dan anggaran Ditjen PAUD - Dikmas	12 dokumen	11.029.758.000
	▪ Dokumen Program	6 dokumen	7.785.900.000
	▪ Dokumen Anggaran	6 dokumen	3.243.858.000
	Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Ditjen PAUD- Dikmas	14 Dokumen	8.594.925.000
	▪ Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	7 Dokumen	6.533.099.000
	▪ Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja	7 Dokumen	2.061.826.000
	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	13 dokumen	9.041.317.000



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017	
		TARGET	ANGGARAN
	▪ Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	3.978.721.000
	▪ Dokumen SPI	1 Dokumen	1.006.041.000
	▪ Dokumen SIMAK BMN	1 Dokumen	4.056.555.000
	Jumlah dokumen kepegawaian, hukum dan tata laksana	18 dokumen	19.120.000.000
	▪ Dokumen Kepegawaian	6 dokumen	3.943.250.000
	▪ Dokumen Hukum	6 Dokumen	4.017.156.000
	▪ Dokumen Tata Laksana	6 dokumen	5.451.650.000
	Dokumen kerjasama, kehumasan, dan publikasi	1 dokumen	18.810.130.000
	▪ Layanan kerjasama promosi publikasi	1 Dokumen	18.810.130.000
	Jumlah dokumen kerumahtanggaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 dokumen	3.690.000.000
	▪ Pengelolaan kerumahtanggaan	1 dokumen	3.690.000.000
	Jumlah dokumen ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 dokumen	2.412.170.000
	▪ Pengelolaan ketatausahaan	1 Dokumen	2.412.170.000
	Jumlah dokumen Pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Berlaku	1 Layanan	12.458.683.000
	▪ Dokumen Pengelolaan BMN	1 Dokumen	12.458.683.000

**Total Jumlah Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD dan Dikmas: Rp 269.552.712.000,-**

## Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017 Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas



(dalam ribu)

RENCANA PENYERAPAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Bulanan	12,786	14,276	20,387	28,653	19,562	15,467	13,847	27,265	36,536	36,000	18,673	13,562
Kumulatif	12,786	27,062	47,449	76,102	95,664	111,131	124,978	152,243	188,779	224,779	243,452	257,014
%	4.74%	10.04%	17.60%	28.23%	35.49%	41.23%	46.37%	56.48%	70.03%	83.39%	90.32%	95.35%

### EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal PAUD  
dan Pendidikan Masyarakat

Harris Iskandar

Jakarta, Januari 2017  
Sekretaris Ditjen PAUD  
dan Pendidikan Masyarakat

Wartanto





**Perjanjian Kinerja Tahun 2017**  
**Sekretariat Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

## **TUGAS**

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

## **FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, akan:

1. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. Mengelola data dan informasi bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. Mengkoordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
6. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
7. Melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
8. Mengelola kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
9. Mengkoordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
10. Mengelola barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
11. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

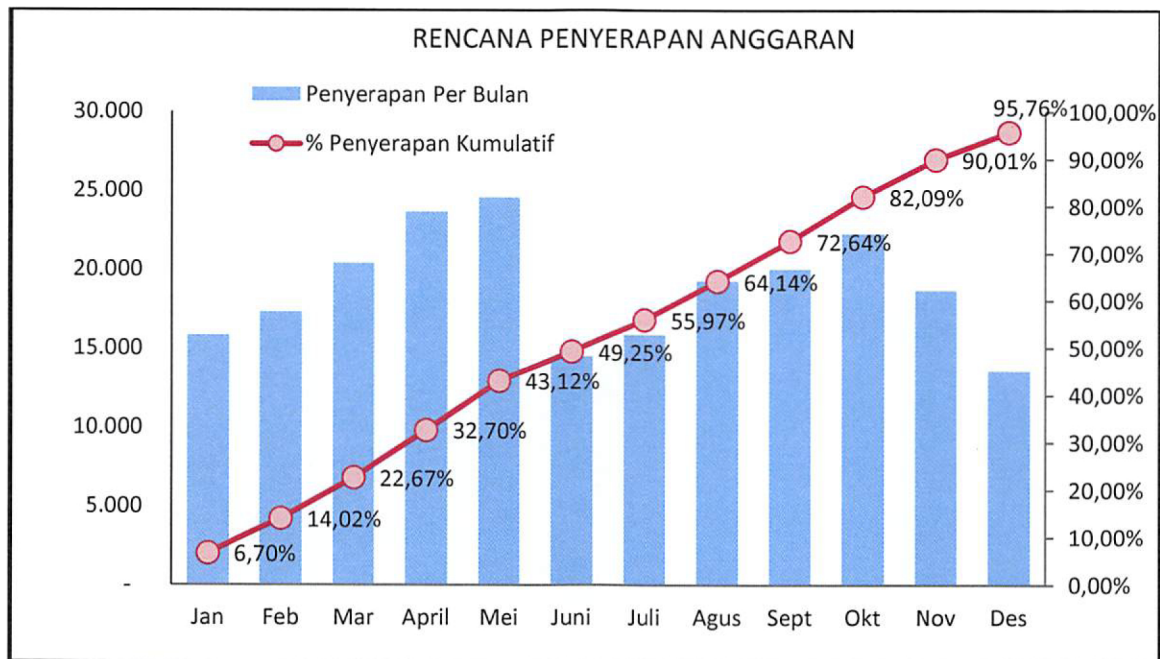
**TARGET CAPAIAN**
**PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**
**KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA  
DITJEN PAUD DAN DIKMAS**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017	
		TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas	<b>Dokumen data dan informasi PAUD- Dikmas nasional, provinsi, kabupaten dan kota</b>	<b>611 Dokumen</b>	<b>18.694.532.000</b>
	▪ Pengelolaan Data dan Informasi	577 Dokumen	10.744.030.000
	▪ Penyelenggara SEAMEO CECCEP	34 Dokumen	7.950.502.000
	<b>Dokumen Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>1.570.415.000</b>
	▪ Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	3 Dokumen	1.570.415.000
	<b>Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas</b>	<b>581 Dokumen</b>	<b>11.069.121.000</b>
	▪ Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	581 Dokumen	11.069.121.000
	<b>Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas</b>	<b>577 Dokumen</b>	<b>6.899.982.000</b>
	▪ Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi	577 Dokumen	6.899.982.000
	<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku</b>	<b>35 Dokumen</b>	<b>4.627.435.000</b>
	▪ Pengelolaan Keuangan	35 Dokumen	4.627.435.000
	<b>Jumlah Dokumen hukum dan Tatalaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (SPM-NSPK)</b>	<b>67 Dokumen</b>	<b>8.433.317.000</b>
	▪ Layanan hukum dan Tatalaksana sesuai dengan Peraturan	67 Dokumen	8.433.317.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017	
		TARGET	ANGGARAN
	Perundang-undangan yang Berlaku (SPM-NSPK)		
	<b>Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku</b>	<b>34 Dokumen</b>	<b>4.745.600.0000</b>
	▪ Layanan Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	34 Dokumen	4.745.600.0000
	<b>Dokumen Kerjasama, Kehumasan, dan Publikasi</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>16.707.430.000</b>
	▪ Layanan Kerjasama, Promosi dan Publikasi	11 Dokumen	16.707.430.000
	<b>Jumlah Dokumen SDM Ditjen PAUD-Dikmas meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya</b>	<b>200 Orang</b>	<b>3.941.083.000</b>
	▪ SDM Ditjen PAUD-Dikmas meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya	200 Orang	3.941.083.000
	<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>5.293.352.000</b>
	▪ Pengelolaan BMN	1 Dokumen	5.293.352.000

**Total Jumlah Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebesar Rp. 235.787.141.000**

## Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017 Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas



(dalam jutaan)

NO	RENCANA PENYERAPAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	TOTAL
1	Bulanan	15.786	17.276	20.387	23.653	24.562	14.467	15.847	19.265	20.030	22.279	18.673	13.562	235.787
2	Kumulatif	15.786	33.062	53.449	77.102	101.664	116.131	131.978	151.243	171.273	193.552	212.225	225.787	
3	%	6,70%	14,02%	22,67%	32,70%	43,12%	49,25%	55,97%	64,14%	72,64%	82,09%	90,01%	95,76%	

### EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Jenderal PAUD  
dan Pendidikan Masyarakat

Harris Iskandar

Sekretaris Ditjen PAUD  
dan Pendidikan Masyarakat

Wartanto

Lampiran 2. Dokumen Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas	Dokumen data dan informasi PAUD-Dikmas nasional, provinsi, kabupaten dan kota	611 Dokumen	611 Dokumen	100	18.694.532.000	16.607.497.532	88,84%
	Pengelolaan Data dan Informasi	577 Dokumen	577 Dokumen	100	10.744.030.000	9.539.638.950	88,79%
	Penyelenggara SEAMEO CECCEP	34 Dokumen	34 Dokumen	100	7.950.502.000	7.067.858.582	88,90%
	Dokumen Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	1.570.415.000	1.379.891.000	87,87%
	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	1.570.415.000	1.379.891.000	87,87%
	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas	581 Dokumen	581 Dokumen	100	11.069.121.000	9.686.894.200	87,51%
	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	581 Dokumen	581 Dokumen	100	11.069.121.000	9.686.894.200	87,51%
	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas	577 Dokumen	577 Dokumen	100	6.899.982.000	6.371.641.700	92,34%
	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi	577 Dokumen	577 Dokumen	100	6.899.982.000	6.371.641.700	92,34%
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	35 Dokumen	35 Dokumen	100	4.627.435.000	4.569.844.162	98,76%
	Pengelolaan Keuangan	35 Dokumen	35 Dokumen	100	4.627.435.000	4.569.844.162	98,76%
	Dokumen hukum dan Tatalaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (SPM-NSPK)	67 Dokumen	67 Dokumen	100	8.433.317.000	7.652.936.500	90,75%
	Pengelolaan Hukum dan tata Laksana	67 Dokumen	67 Dokumen	100	8.433.317.000	7.652.936.500	90,75%
	Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	34 Dokumen	34 Dokumen	100	4.745.600.000	4.054.416.100	85,44%
	Dokumen Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang	34 Dokumen	34 Dokumen	100	4.745.600.000	4.054.416.100	85,44%
	Dokumen Kerjasama, Kehumasan, dan Publikasi	11 Dokumen	11 Dokumen	100	16.707.430.000	16.139.712.604	86,39%
	Layanan Kerjasama, Promosi dan Publikasi	11 Dokumen	11 Dokumen	100	16.707.430.000	16.139.712.604	96,60%
	SDM Ditjen PAUD-Dikmas Meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya	200 Orang	200 Orang	100	3.941.083.000	3.734.519.800	94,76%
	Pengelolaan SDM PAUD dan Dikmas	200 Orang	200 Orang	100	3.941.083.000	3.734.519.800	94,76%
	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	1 Dokumen	1 Dokumen	100	5.293.352.000	5.011.453.625	94,67%
	Pengelolaan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100	5.293.352.000	5.011.453.625	94,67%
	TOTAL				81.982.267.000	75.208.807.223	91,74%





